



OPEN ACCESS
Vol. 12 No. 1: 136-144
Mei 2019
Peer-Reviewed

Jurnal Agribisnis Perikanan (E-ISSN 2598-8298/P-ISSN 1979-6072)
URL: <https://ejournal.stipwunaraha.ac.id/index.php/AGRIKAN/>
DOI: 10.29239/j.agrikan.12.1.136-144

AGRIKAN



Persepsi Penerapan Sasi Laut di Wilayah Perairan Kepulauan Kei: Upaya Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Laut

(Perception on the application of local wisdom in form of Sasi in Kei Islands: An effort to support sustainability marine resources)

Ana Diana Santy Betaubun¹, Sergius Epo Bran Laiyanan¹, Ditel Renyaan¹, Frischilla Pentury¹✉

¹ Program Studi Agribisnis Perikanan, Jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Politeknik Perikanan Negeri Tual, Jln Raya Langgur-Sathean Km. 6, Langgur. Kabupaten Maluku Tenggara 97611, Indonesia

✉ Info Artikel:

Diterima : 22 Juni 2019
Disetujui : 30 Juni 2019
Dipublikasi : 30 Juni 2019

📄 Artikel Penelitian

🔑 Keyword:

Sasi, Kearifan Lokal, keberlanjutan, Kepulauan Kei

✉ Korespondensi:

Frischilla Pentury
Program Studi Agribisnis Perikanan,
Jurusan Teknologi Hasil Perikanan,
Politeknik Perikanan Negeri Tual
Maluku Tenggara, Indonesia

Email: ispentury12@gmail.com



Copyright© Mei 2019 AGRIKAN

Abstrak. Secara konsep dan tujuannya Sasi ditujukan untuk keberlanjutan lingkungan dan perekonomian masyarakat pesisir meskipun tingkat resistensi cukup tinggi dari warga. Penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemberlakuan perlindungan zona laut dan MPA sehingga dapat ditetapkan aturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal yaitu sasi laut. Penelitian ini dilakukan di Kepulauan Kei, Maluku. Sampel penelitian diambil dari 5 Desa yang tersebar pada 5 kecamatan dan dua wilayah administrasi, sebanyak 52 responden digunakan dalam penelitian yang dianalisis dengan alat analisis regresi logistik. Hasil penelitian didapatkan bahwa persepsi masyarakat pesisir pada pentingnya perlindungan wilayah perairan di Kepulauan Kei harus segera dilindungi, selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di wilayah ini setuju dengan adanya aturan formal untuk melindungi sumber daya laut berdasarkan konsep sasi. Selanjutnya faktor dukungan dan aturan formal akan meningkatkan dukungan masyarakat pesisir pada penggunaan sasi untuk perlindungan laut. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah di Kepulauan Kei perlu menyusun dan menetapkan peraturan daerah pemanfaatan sumber daya laut, sehingga keberlanjutan sumber daya laut di wilayah ini dapat bertahan.

Abstract. Conceptually and the objective of Sasi is aimed at the sustainability of the environment and the economy of coastal communities, although the level of resistance is often high coastal communities. This research provides input to the central and regional governments in order to enforce marine zone and MPA protection so that rules can be set in accordance with the conditions of the community with a local wisdom approach, namely sasi. This research was conducted in Kei Islands, Maluku. The study samples were taken from 5 villages spread over 5 sub-districts and two administrative regions, with 52 respondents used in the study analyzed by logistic regression analysis. The results of the study found that the community considered that the immediate territorial waters and should be further protected by coastal communities had reached the point where they agreed to the formal rules for protecting marine resources based on the concept of sasi. Furthermore, the formal support and rule factor would increase the support of coastal communities in the use of sasi for marine protection. The implication of this research is that the regional government in the Kei Islands in order to immediately formulate and stipulate regional regulations on the use of marine resources, so that the sustainability of marine resources in this region can survive.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sasi atau sasi laut merupakan model pengelolaan sumberdaya yang dimaksudkan dalam rangka menjaga keberlanjutan hasil laut yang dimiliki dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan melarang penangkapan ikan, lola, dan teripang pada waktu-waktu tertentu (McLeod et al., 2009; Adhuri, 2013). Setiap desa memiliki petuanan laut (hak atas perairan laut) yang berbeda antar satu

kawasan dengan kawasan lainnya. Hal ini tentu berimplikasi pada perbedaan pengelolaan pada sumber daya laut yang terkandung di dalamnya. Sasi diberlakukan oleh desa yang memiliki petuanan (hak milik laut berdasarkan adat), meskipun demikian dalam pelaksanaannya dapat memunculkan potensi konflik antar warga dalam desa maupun dengan desa tetangga. Namun demikian, ketika ada desa yang menerapkan sasi yang juga memiliki perairan yang memiliki sumber daya ikan yang besar serta potensi lokasi

wisata yang besar tentu akan berdampak pada tingkat perekonomian bukan hanya bagi warga desa tersebut dan sekitarnya tetapi juga bagi masyarakat wilayah secara umum.

Di Kepulauan Kei terkait pengelolaan sumber daya laut terdapat kebiasaan yang merupakan kearifan lokal yang dikenal dengan sasi, yang mana merupakan kebiasaan adat istiadat di wilayah ini. Sasi diberlakukan dalam rangka perlindungan kawasan perairan tertentu dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan menjaga sumber daya alam laut sekaligus meningkatkan hasil tangkapan laut. Sasi diberlakukan oleh desa yang memiliki petuanan (hak milik laut berdasarkan adat), meskipun demikian dalam pelaksanaannya dapat memunculkan potensi konflik antar warga dalam desa maupun dengan desa tetangga.

Secara konsep dan tujuannya, sasi dimaksudkan untuk keberlanjutan lingkungan. Penerapan sasi sebagai kearifan lokal memenuhi kriteria keberlanjutan dalam rangka perlindungan sumber daya laut berbasis kearifan lokal. Meskipun demikian, dalam keterkaitannya dengan perekonomian masyarakat pesisir yang cenderung pragmatis, maka penerapan sasi laut kemungkinan akan mendapatkan tantangan dalam proses penerapannya. Perlindungan wilayah laut di Kepulauan Kei penting untuk segera dilakukan, mengingat tren dan kondisi terkini, serta prediksi pada dekade yang akan datang sumber daya perikanan khususnya ikan di wilayah perairan Maluku secara umum termasuk di Kepulauan Kei akan mengalami penurunan (Teniwut, 2016). Hal ini semakin menguatkan argumentasi pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan yang baik. Sementara di sisi yang lain, adanya pemberlakuan Sasi Laut maka sumber perekonomian warga akan sangat terganggu, dikarenakan sebagai wilayah kepulauan, masyarakat pesisir di Kepulauan Kei banyak menggantungkan ekonomi rumah tangga mereka pada sektor perikanan dan kelautan.

Dengan demikian terdapat kontradiksi antara tujuan yang baik dari pemberlakuan Sasi Laut dengan kondisi empiris masyarakat pesisir di wilayah perairan di Kepulauan Kei. Meskipun demikian masyarakat di Kepulauan Kei sudah memiliki pemahaman dasar pengelolaan perikanan (Teniwut et al., 2017), sehingga pemanfaatan kearifan lokasi berbentuk sasi laut dapat menjadi solusi dalam rangka pemenuhan

ekonomi dari sumber daya laut pada masa depan (Hamid et al., 2017). Namun demikian, penelitian ini sangat krusial mengingat perkembangan wisata bahari di Kepulauan Kei yang semakin berkembang pesat, kemudian jumlah penduduk yang semakin meningkat ditambah dengan adanya illegal fishing serta penggunaan alat tangkap ilegal membuat kondisi lingkungan perairan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya berada dalam risiko kerusakan pada masa yang akan datang. Kondisi ini membuat sangat diperlukan regulasi yang dapat mengikat seluruh masyarakat Kepulauan Kei yang terikat dalam kesatuan adat istiadat.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kondisi empiris di lapangan pada perlindungan wilayah laut, secara lebih detail tujuan dari penelitian ini adalah, 1) mengukur tingkat urgencies dukungan masyarakat pada perlindungan wilayah laut di Kepulauan Kei serta dukungan mereka pada formalitas aturan kearifan lokal. 2) mengukur dukungan perlindungan laut dengan sasi serta mengukur faktor keberlanjutan mana yang menjadi pertimbangan dalam perlindungan laut (lingkungan, ekonomi dan sosial). 3) mengidentifikasi faktor-faktor yang paling signifikan mempengaruhi persepsi dukungan masyarakat pesisir pada perlindungan wilayah laut dengan sasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemberlakuan perlindungan zona laut dan MPA sehingga dapat ditetapkan aturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal yaitu sasi laut sebagai bentuk kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan wisata bahari.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan mulai dari Maret hingga Mei 2019. Lokasi penelitian yakni wilayah Kepulauan Kei, Provinsi Maluku, Indonesia yaitu Desa Taar, Desa Ngilngof, Desa Selayar, Desa Revav, Desa Tetoat (Gambar 1). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode purposive sampling dimana telah ditentukan obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nelayan-

nelayan yang dari kelima desa yang menjadi lokasi dari penelitian ini. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara. Dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan pada kelima lokasi penelitian, diperoleh sebanyak 52 responden yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian.

2.2. Tahapan Penelitian

Pada tahapan awal, perumusan masalah dilakukan dan sekaligus menetapkan tujuan dari penelitian, yaitu mengukur persepsi masyarakat pada penerapan kearifan lokal (Sasi Laut) pada wilayah perairan dari masing-masing desa berdasarkan kriteria keberlanjutan Hubungan Masyarakat (Society), Ekonomi (Economic) dan Lingkungan (Environment)) di Kepulauan Kei. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan pada kriteria kemudahan lokasi serta intensitas perikanan tangkap dan wisata bahari yang dilakukan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara untuk kemudian diolah menggunakan metode Logistic Regression Analysis.

2.3. Analisis Data

Untuk menganalisis persepsi masyarakat pada penerapan sasi laut sebagai upaya pengelolaan sumberdaya perikanan dan wisata bahari, digunakan metode regresi logistik dengan analisis proporsi populasi dengan persamaan (Sudjana, 2002):

$$Z = \frac{x/n - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)/n}}$$

Dengan:

x/n = Proporsi sampel

n = Banyaknya sampel

x = Banyaknya sampel yang mempunyai sikap mendukung penerapan kearifan lokal (Sasi Laut)

π_0 = Sebuah harga yang diketahui (60% atau 0,60)

Kriteria pengambilan keputusan:

$H_0 : Z < 0,60$ atau $H_1 : Z > 0,60$

Dalam hal ini, tolak H_0 jika $Z \geq Z_{0,5-\alpha}$, dimana $Z_{0,5-\alpha}$ didapat dari daftar normal baku dengan peluang $(0,5 - \alpha)$. Sedangkan jika $Z < Z_{0,5-\alpha}$ maka hipotesis H_0 diterima.

Hipotesisnya adalah:

- $H_0 : z < 0,60$ yakni, kurang dari 60% masyarakat mempunyai sikap mendukung pengelolaan ekosistem mangrove.
- $H_1 : z > 0,60$ yakni, lebih dari 60% masyarakat mempunyai sikap mendukung pengelolaan ekosistem mangrove.

Selanjutnya variabel tak bebas dan variabel-variabel bebas yang bersifat kualitatif (skala pengukuran ordinal) dibentuk dalam variabel dummy, dan diuraikan sebagai berikut:

$Y : 1 =$ Jika sikap masyarakat mendukung; dan $0 =$ Jika sikap masyarakat tidak mendukung.

$X_n : 1 =$ Jika penting/perlu/setuju dan $0 =$ Jika penting/perlu/setuju.

Hipotesis yang digunakan adalah:

a) Untuk uji G adalah:

H_0 : Variabel bebas dalam model tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas, atau semua variabel bebas secara simultan tidak dapat menjelaskan variabel tak bebas.

H_1 : Variabel bebas dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas, atau semua variabel bebas secara simultan dapat menjelaskan variabel tak bebas.

b) Untuk uji koefisien variable bebas (Uji Z) adalah:

H_0 : Koefisien variabel bebas dalam model regresi tidak signifikan.

H_1 : Koefisien variabel bebas dalam model regresi signifikan.

2.4. Karakteristik Responden

Karakteristik sosial masyarakat pesisir di Kepulauan Kei berdasarkan tingkat pendidikan formal didominasi tingkat pendidikan SD hingga SMA pada usia sebagian besar >35 tahun. Dari segi ekonomi, angkatan nelayan tangkap maupun budidaya perikanan di wilayah penelitian belum mengalami peremajaan yang baik. Jumlah tanggungan keluarga cukup besar sehingga akan berkontribusi pada tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir yang cenderung rendah.

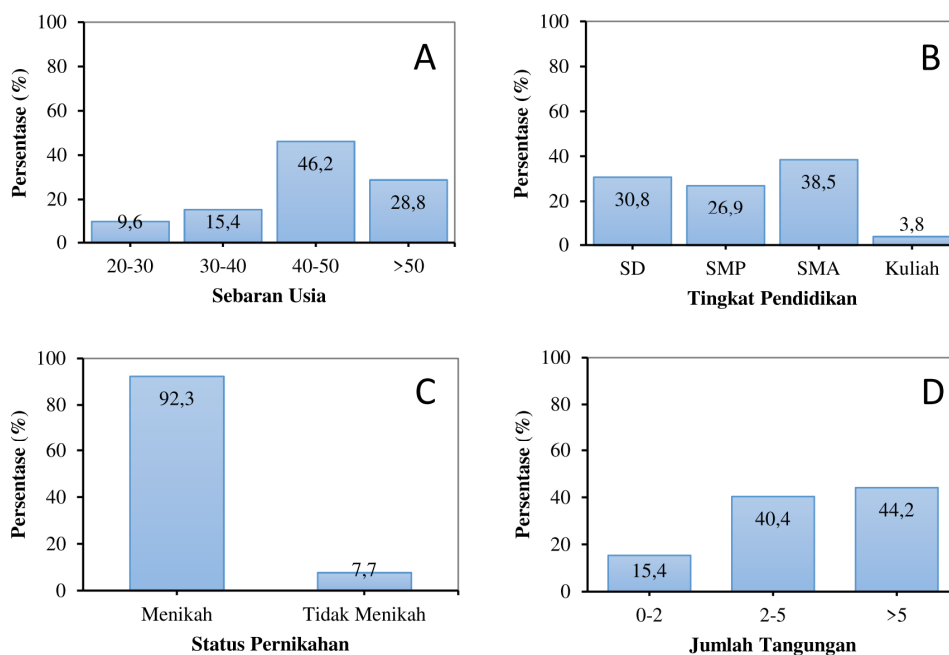
Responden yang terlibat dalam penelitian diklaster menurut usia, tingkat pendidikan, status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga. Untuk responden berusia 20-30 tahun sebanyak 9.6%, berusia 30-40 tahun sebanyak 15.4%, responden berusia 40-50 tahun sebanyak 46.2%, dan responden berusia >50 tahun sebanyak 28.8%. Untuk responden berdasarkan tingkat pendidikan, responden pendidikan SD sebanyak 30.8%, SMP sebanyak 26.9%, SMA sebanyak 38.5%, dan kuliah D3 maupun S1 sebanyak 3.8%. Untuk indikator status pernikahan, sebanyak

92.3% berstatus menikah, dibanding 7.7% belum menikah. Responden dengan jumlah tanggungan keluarga 0-2 orang sebanyak 15.4%, 3-5 orang sebanyak 40.4%, dan jumlah tanggungan >5 orang sebanyak 44.2% (Gambar 2).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Urgenitas dan dukungan masyarakat pada aturan formal

Hasil penelitian urgenitas dan dukungan masyarakat pada aturan formal menunjukkan bahwa sebanyak 65.1% masyarakat berpendapat sudah saatnya wilayah laut di Kepulauan Kei harus dilindungi dibandingkan 38.5% masyarakat pesisir menganggap belum saatnya wilayah laut di Kepulauan Kei dilindungi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat pesisir di Kepulauan Kei menganggap bahwa wilayah perairan sudah saatnya dilindungi. Adanya illegal fishing dan perilaku penangkapan sangat tidak bertanggungjawab seperti penggunaan bom ikan dan pukot harimau membuat kondisi wilayah laut di Kepulauan Kei secara umum menjadi sangat terancam. Selanjutnya, dilain pihak sumber daya ikan diwilayah ini dengan tren saat ini maka akan secara gradual mengalami penurunan (Teniwut, 2016). sehingga akumulasi kondisi membuat perlindungan wilayah laut di Kepulauan Kei

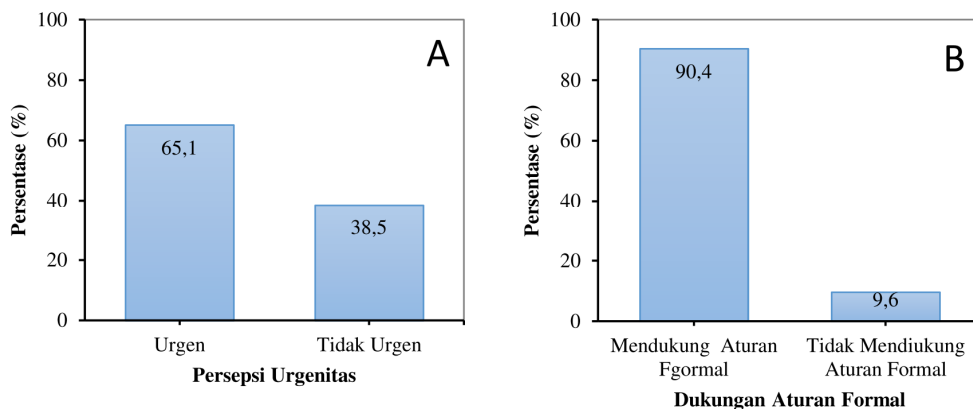


Gambar 2. Karakteristik Sosial ekonomi responden. (A: karakteristik responden menurut sebaran usia, B: karakteristik responden menurut tingkat pendidikan, C: karakteristik responden menurut status pernikahan, dan D: karakteristik responden menurut jumlah tanggungan keluarga).

sudah saatnya untuk dilakukan secara tegas.

Lebih lanjut, berdasarkan kondisi saat ini masyarakat pesisir Kepulauan Kei telah sampai pada titik setuju adanya aturan formal untuk melindungi sumber daya laut berdasarkan konsep sasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sebanyak 90,4% masyarakat pesisir setuju untuk memformalkan sasi laut dalam aturan hukum positif dibandingkan hanya 9,6% masyarakat yang menganggap belum perlu adanya aturan formal dari sasi laut (Gambar 3). Hal ini penting agar ketika terjadi konflik maka pemerintah dan aparat memiliki dasar hukum untuk mengintervensi konflik yang terjadi, hal ini karena potensi konflik intra dan inter masyarakat desa di Kepulauan Kei akibat pemanfaatan sumber daya perikanan dapat terjadi (Yamazaki et al., 2018).

Sasi yang didukung agar diformalkan dalam aturan positif salah satunya berlandaskan pada tujuan dimana terdapat keadilan penggunaan sumber daya laut. Dengan demikian melindungi kearifan lokal, pada dasarnya berimplikasi kepada perlindungan sumber daya perikanan, yang dalam konteks Indonesia sebagai bagian dari kekayaan sumber daya alam yang merupakan kekayaan yang harus didistribusikan secara merata, dimana hal ini sesuai dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 dengan jelas disebutkan bahwa dalam pengelolaan perikanan berasas, antara lain asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya aturan formal dari kearifan akan



Gambar 3. Persepsi masyarakat pada urgenitas perlindungan laut dan dukungan pada aturan formal perlindungan laut dengan Sasi. (A: persepsi masyarakat terhadap urgenitas penerapan sasi laut dan B: dukungan masyarakat terhadap aturan formal sasi).

Kondisi ini sangat dipahami mengingat pada wilayah pesisir dan kepulauan salah satu pendekatan yang efektif selain faktor ekonomi dalam pelaksanaan program konservasi laut pada masyarakat pesisir adalah dengan pendekatan lingkungan dalam hal ini adalah perubahan iklim, pada wilayah kepulauan di Fiji masyarakat bersedia diajak untuk mendukung program konservasi laut dengan tujuan untuk mengantisipasi perubahan iklim tropis (Takasaki, 2016). Dengan demikian maka dalam pelaksanaan program konservasi yang berhasil adalah program yang melibatkan masyarakat dalam lokasi pemberlakuan perlindungan laut yang di konservasi (Brown et al., 2016).

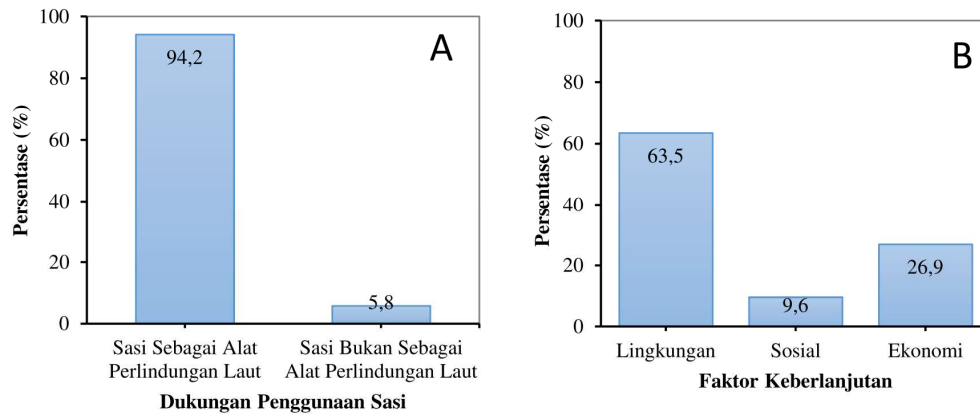
cenderung menurunkan adanya potensi konflik antar warga di Kepulauan Kei (Teniwut et al., 2017).

3.2. Faktor keberlanjutan dan dukungan penggunaan sasi laut

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keberlanjutan dan dukungan penggunaan sasi laut didapatkan bahwa sebanyak 94,2% berpendapat bahwa sasi laut menjadi alat yang paling efektif dalam melindungi wilayah laut di Kepulauan Kei, dibandingkan 5,8% masyarakat pesisir yang menolak penggunaan sasi laut bagi perlindungan wilayah laut. Selanjutnya dari hasil penelitian juga telah ditemukan bahwa alasan

keberlanjutan yang mendorong adanya perlindungan wilayah laut di Kepulauan Kei adalah sebanyak 63.5% menyebut lingkungan sebagai alasan utama, dilanjutkan dengan faktor sosial sebanyak 9.6% dan ekonomi sebanyak 26.9% (Gambar 4).

dampak negatif dari penggunaan kearifan lokal bagi perlindungan sumber daya alam, dimana dampak negatif yang muncul dari suatu kearifan lokal adalah terjadinya penangkapan yang berlebih (*overexploitation*) terhadap sumber daya ikan (Syafriyulis, 2011). Sedangkan dampak



Gambar 4. Faktor keberlanjutan dan dukungan penerapan Sasi. (A: persepsi masyarakat terhadap dukungan penggunaan sasi laut dan B: persepsi masyarakat terhadap faktor keberlanjutan sumberdaya).

Dengan demikian maka diperoleh faktor lingkungan menjadi pendorong utama dalam upaya perlindungan sumber daya laut di Kepulauan Kei. Hasil penelitian ini merupakan penegasan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya oleh Vo et al., (2013); Talaue-McManus (2000); Awabdi et al., (2018); CBD (1992). Kondisi ini sangat dipahami, dimana lingkungan perairan yang baik tentu saja akan menghasilkan sumber daya yang berkelanjutan dan lebih produktif. Secara visual, di Kepulauan Kei meskipun lokasi perairan diapit oleh dua wilayah potensi penangkapan (WPP) tetapi pada kenyataannya kondisi laut mengalami penurunan selain akibat perilaku negatif nelayan tetapi juga sampah plastik yang merusak terumbu karang dan merusak ekosistem pantai di Kepulauan Kei. Dengan demikian perlindungan wilayah laut semakin krusial untuk segera dilakukan untuk menghindari dampak buruk akibat kerusakan lingkungan laut.

Lebih lanjut masyarakat pesisir di Kepulauan Kei juga menganggap bahwa kearifan lokal dalam bentuk sasi merupakan cara yang efektif dalam rangka perlindungan perairan Kepulauan Kei. Meskipun demikian terdapat

positif kearifan lokal di dalam pengelolaan sumber daya ikan sangat kental terlihat di dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Barat contohnya adalah yang berupa lubuk larangan (Kurniasari et al., 2013). Sehingga pengelolaan berbasis masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah lokal umumnya lebih efektif dalam mencapai hasil yang diharapkan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi faktor penting di dalam pengelolaan kawasan konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan (Kartamihardja et al., 2014).

3.3. Faktor-Faktor pendukung penerapan Sasi di Kepulauan Kei

Dari pengolahan data regresi logistik ditemukan bahwa dari sepuluh variabel independen, terdapat dua variabel yang signifikan mempengaruhi urgenitas dukungan masyarakat pada perlindungan wilayah laut dengan sasi, yaitu tingkat dukungan dan adanya aturan formal. Semakin tinggi persepsi positif dan terdapat aturan formal maka dukungan masyarakat pesisir pada perlindungan wilayah laut dengan sasi di Kepulauan Kei (Tabel 1). Urgenitas dukungan masyarakat didorong oleh faktor ekonomi. Pada wilayah pesisir dan

kepulauan salah satu pendekatan yang efektif selain faktor ekonomi dalam pelaksanaan program konservasi laut pada masyarakat pesisir adalah dengan pendekatan lingkungan dalam hal ini adalah perubahan iklim, pada wilayah kepulauan di Fiji masyarakat bersedia diajak untuk mendukung program konservasi laut dengan tujuan untuk mengantisipasi perubahan iklim tropis (Takasaki, 2016). Dengan demikian maka dalam pelaksanaan program konservasi yang berhasil adalah program yang melibatkan masyarakat dalam lokasi pemberlakuan perlindungan laut yang di konservasi (Brown et al., 2016).

Tabel 1. Regresi Logistik

Variabel	Nilai B	Signifikansi
Usia	0.034	0.453
Pendidikan	0.458	0.423
Status Pernikahan	1.000	0.652
Tanggungjawab Keluarga	-0.233	0.307
Peran Perairan Bagi Masyarakat	-0.416	0.510
Faktor Keberlanjutan	-0.349	0.418
Perlindungan Laut	20.925	0.999
Aturan Formal***	3.375	0.036
Dukungan Masyarakat***	2.006	0.008

* Nagelkerke R Square: 0.648; Hosmer and Lemeshow Test: 38.219 (0.000) **B adalah konstanta.

Pada wilayah pedesaan (rural region) khususnya pada negara yang sedang membangun masalah konservasi sering terbentur oleh masalah sosial ekonomi, mulai dari perbedaan kondisi sosial, pendidikan dan peluang kerja dan perbandingan kehidupan antara wilayah perkotaan dan pedesaan termasuk diantaranya adalah perubahan iklim dan kestabilan politik (Neleman dan de Castro, 2016; Rosegrant, et al. 2016). Indonesia sebagai salah satu wilayah yang termasuk dalam perairan coral triangle merupakan hal yang sudah sewajarnya memperlakukan program MPA, meskipun demikian pada pelaksanaannya untuk program MPA yang sudah dilaksanakan seperti pada wilayah perairan Sulu di Sulawesi bahwa kebijakan yang diambil terkait dengan pelaksanaan MPA di wilayah itu belum sesuai

dengan prinsip konservasi karena pemilihan lokasi tidak berdasarkan pada urgensi lokasi perairan yang mengalami ancaman ekologi (Boon dan Beger, 2016), kemudian peran dari pihak lain khususnya peneliti dan LSM juga penting dalam rangka memberikan pemahaman yang baik pada program konservasi laut ke masyarakat (Freed et al., 2016).

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Masyarakat menganggap sudah saatnya wilayah laut di Kepulauan Kei lindungi dan setuju untuk memformalkan sasi laut dalam aturan hukum positif. Sasi laut menjadi alat yang paling efektif dalam melindungi wilayah laut, dengan alasan keberlanjutan yang mendorong adanya perlindungan wilayah laut. Faktor-faktor pendorong dukungan masyarakat pesisir pada wilayah laut dengan sasi adalah adanya aturan formal dan positifnya dukungan yang telah ada saat ini pada perlindungan laut.

4.2. Saran

Implikasi penelitian bagi pihak pengambil kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah daerah di Kepulauan Kei, agar segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah pemanfaatan sumber daya laut, sehingga keberlanjutan sumber daya laut di wilayah ini dapat bertahan. Hal ini penting mengingat illegal fishing yang marak terjadi termasuk potensi konflik antar warga yang terjadi akibat pemanfaatan wilayah perairan di wilayah ini. Pemerintah daerah perlu untuk selalu memanfaatkan kearifan lokal di wilayah ini sehingga resistensi masyarakat pada setiap aturan dapat lebih kecil, termasuk diantaranya penerapan sasi laut untuk perlindungan wilayah laut di Kepulauan Kei.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak W. Teniwut, SE, MM dan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Perikanan Negeri Tual Bapak S.K Hamid, S.Pi, MP atas bantuannya. Penelitian dibiayai melalui Hibah PKM Penelitian Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nomor Kontrak: 870/SPK/KM.02.01/2019.

REFERENSI

- Adhuri, D.S. 2013. *Selling the Sea, Fishing for Power: A Study of Conflict over Marine Tenure in Kei Islands, Eastern Indonesia*. Asia-Pacific Environment Monograph, no. 8. Canberra, Australia: ANU E Press: 217 pp.
- Awabdi, D. R., Tavares, D. C., Bondioli, A. C. V., Zappes, C. A., & Di Benedetto, A. P. M. 2018. Influences of conservation action on attitudes and knowledge of fishermen towards sea turtles along the southeastern Brazil. *Marine Policy*, 95, 57-68.
- Boon, P. Y., dan Beger, M. 2016. The effect of contrasting threat mitigation objectives on spatial conservation priorities. *Marine Policy*, 68, 23-29.
- Brown, G., Strickland-Munro, J., Kobryn, H., dan Moore, S. A. 2016. Stakeholder analysis for marine conservation planning using public participation GIS. *Applied Geography*, 67, 77-93.
- CBD, U. 1992. *Convention on Biological Diversity (with annexes), Concluded at Rio de Janeiro on 5 June 1992*. Convention on Biological Diversity.
- Freed, S., Dujon, V., Granek, E. F., dan Mouhhidine, J. 2016. Enhancing small-scale fisheries management through community engagement and multi-community partnerships: Comoros case study. *Marine Policy*, 63, 81-91.
- Hamid, S. K., Teniwut, W. A., Teniwut, R. M., Rahantoknam, M. A., Hasyim, C. L., & Hungan, M. 2017. The Support of MPA (Marine Protected Area) in Coral Triangle Area: Evidence from Kei Islands, Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 89(1): 012025). IOP Publishing.
- Kartamihardja, E. S., Umar, C dan Aisyah. 2014. Pembelajaran dari pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Arwana Merah (*Scleropages formosus*, Muller and Schlegel, 1844) Bebas Masyarakat di Danau Empangau, Kalimantan Barat. *J.Kebijak.Perikan.Ind.* 6(2), 55-64.
- Kurniasari, N., Yulisti, M dan Yuliaty, C. 2013. Lubuk larangan: Bentuk perilaku ekologis masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum daratan (tipologi sungai). *J.Sosek. KP.* 8(2), 241-249.
- McLeod, E., Szuster, B., dan Salm, R. 2009. Sasi and marine conservation in Raja Ampat, Indonesia. *Coastal Management*, 37(6), 656-676.
- Neleman, S., dan de Castro, F. 2016. Between nature and the city: youth and ecotourism i a Amazo ia 'forest tow 'o the Brazilia Atla tic Coast. *Journal of Ecotourism*, 15(3), 261-284.
- Rosegrant, M. W., Dey, M. M., Valmonte-Santos, R., dan Chen, O. L. 2016. Economic impacts of climate change and climate change adaptation strategies in Vanuatu and Timor-Leste. *Marine Policy*, 67, 179-188.
- Sudjana. 2002. *Metode Statistika*. Edisi Keenam. Bandung: Transito
- Syafriyulis. 2011. Pengelolaan perikanan lebak lebung di Kab. OKI berbasis ekonomi kerakyatan. *Prosiding Forum Periaran Umum Indonesia VIII*. Balai Penelitian Perikanan Periaran Umum, Palembang. pp. 41 - 54.
- Takasaki, Y. 2016. Learning from disaster: community-based marine protected areas in Fiji. *Environment and Development Economics*, 21(01), 53-77.
- Talaue-McManus, L. 2000. *Transboundary Diagnostic Analysis for the South China Sea (2000)*. EAS/RCU Technical Report Series No. 14. UNEP, Bangkok, Thailand: http://www.cobsea.org/documents/Transboundary_Diagnostic_Analysis.pdf
- Teniwut, W. A. 2016. For sustainable revenue of fisheries sector in small islands: evidence of Maluku, Indonesia. *Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation-International Journal of the Bioflux Society (AACL Bioflux)*, 9(3).
- Teniwut, R. M., Hasyim, C. L., & Teniwut, W. A. 2017. Resource-Based Capability on Development Knowledge Management Capabilities of Coastal Community. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 89(1), 012017). IOP Publishing.
- Teniwut, W. A., Teniwut, Y. K., Teniwut, R. M., & Hasyim, C. L. 2017. Family vs Village-Based: Intangible View on the Sustainable of Seaweed Farming. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 89(1), 012021. IOP Publishing.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Vo, S. T., Pernetta, J. C., & Paterson, C. J. 2013. Status and trends in coastal habitats of the South China Sea. *Ocean & Coastal Management*, 85, 153-163.

Yamazaki, S., Resosudarmo, B. P., Girsang, W., & Hoshino, E. 2018. Intra-village and inter-village resource use conflict in Indonesia: The case of the Kei Islands. *Ocean & coastal management*, 155, 50-59.

How to cite this article:

Betaubun, A.S., Laiyanan, S.E.B., Renyan, D. & Pentury, F. 2019. Persepsi penerapan Sasi Laut di wilayah perairan di Kepulauan Kei: Upaya mendukung keberlanjutan sumber daya laut. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 12(1): 136-144. DOI: <https://doi.org/10.29239/agrikan.12.1.136-144>